

KETERKAITAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN DARI  
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TERHADAP  
PRINSIP *GOOD FINANCIAL GOVERNANCE*

Brilliant Willis

Ilmu Hukum

Pembimbing:

Prof. Dr. Lanny Kusumawati Dra., S.H., M.Hum.

Wafia Silvi Dhesinta Rini, S.H., M.H.

*ABSTRACT*

*Abstract— This study is to examine the relationship between the implementation of good financial government with unqualified opinion. The type of research method used in this study is a normative juridical method by conducting a literature study on related legal materials. The results of this study are that there is a relationship between Unqualified Opinion issued by the Supreme Audit Agency and the principle of good financial government, one of the benchmarks of which is based on Government Accounting Standards regulated in Article 32 of Law Number 17 of 2003 concerning State Finance in order to present the results of the technical performance of the State Audit Board of the Republic of Indonesia on the examination of financial statements in accordance with the standards and laws and regulations. Unqualified Opinion is a manifestation of the values of good governance, namely accountability, participation, and transparency, but this does not rule out the possibility that there are irregularities that cannot be detected during the audit process and do not guarantee the absence of corruption by government administrators.*

*Keywords : Supreme Audit Agency, Unqualified Opinion, Good Financial Government*

KETERKAITAN OPINI WAJAR TANPA PENGECEUALIAN DARI  
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TERHADAP  
PRINSIP *GOOD FINANCIAL GOVERNANCE*

Brilliant Willis

Ilmu Hukum

Pembimbing:

Prof. Dr. Lanny Kusumawati Dra., S.H., M.Hum.

Wafia Silvi Dhesinta Rini, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini untuk meneliti keterkaitan antara penerapan good financial government dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan melakukan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum terkait. Hasil daripada penelitian ini adalah terdapat keterkaitan antara Opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dengan prinsip good financial government yang salah satu tolak ukur penilaiannya didasarkan pada Standar Akuntansi Pemerintahan yang diatur dalam pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara guna menyajikan hasil kinerja secara teknis Badan Pemeriksa Keuangan terhadap pemeriksaan laporan keuangan telah sesuai dengan standar dan peraturan perundang-undangan. Opini Wajar Tanpa Pengecualian merupakan wujud dari nilai-nilai good governance yakni akuntabilitas, partisipasi, dan transparansi tetapi hal ini tidak menutup kemungkinan masih terdapat penyimpangan yang tidak dapat terdeteksi selama proses audit serta tidak menjamin tidak adanya korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan.

Kata Kunci: Badan Pemeriksa Keuangan, Opini Wajar Tanpa Pengecualian, Good Financial Government